

DINAMIKA PEMBENTUKAN KOALISI PARTAI POLITIK PADA PILKADA

DYNAMICS OF POLITICAL PARTY COALITION FORMATION IN REGIONAL HEAD ELECTIONS

Fhisilmi Kaffah, Hasanuddin, Auradian Marta

Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru

*Koresponden email: fhisilmianwar@gmail.com

ABSTRAK

Koalisi partai politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 terdiri dari tiga koalisi yang terbentuk tidak mengikuti pola koalisi nasional, diikuti oleh kandidat yang sama dengan pemilihan sebelumnya, dan dimenangkan oleh koalisi dengan jumlah paling kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dalam pembentukan koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya koalisi. Teori yang digunakan adalah teori koalisi menurut Arend Lijphart (1999) yang mengidentifikasi koalisi kedalam enam jenis. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen yang kemudian data di reduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pembentukan koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung secara dinamis dan bersifat cair. Koalisi yang dibentuk tidak mengikuti pola koalisi nasional dan juga tidak berdasarkan ideologi partai. Koalisi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dibentuk dengan tujuan utama mendapatkan dan memaksimalkan kebijakan serta mengabaikan ideologi dan kesamaan preferensi kebijakan partai.

Kata kunci: Dinamika, koalisi partai politik, pilkada

ABSTRACT

The political party coalition to take part in the 2020 Kuantan Singingi Regency regional head election consists of three coalitions which were formed not following the national coalition pattern, followed by the same candidates as in the previous election, and won by the coalition with the smallest number. This research aims to analyze the dynamics in the formation of political party coalitions in the 2020 Kuantan Singingi Regency regional head election and the factors that influence coalition formation. The theory used is coalition theory according to Arend Lijphart (1999) which identifies coalitions into six types. The location of this research is Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This research uses a qualitative approach and data collection is carried out by interviews and document searches, then the data is reduced, presented and concluded. The research results obtained were that the formation of political party coalitions in the Kuantan Singingi Regency regional head election took place dynamically and was fluid. The coalition that was formed did not follow the national coalition pattern and was also not based on party ideology. The coalition in the 2020 Kuantan Singingi Regency regional head election was formed with the main aim of obtaining and maximizing policies and ignoring ideology and similarities in party policy preferences.

Keywords: Dynamics, coalition of political parties, regional elections

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan pemeran utama dalam sistem politik demokrasi. Partai politik memiliki fungsi penghubung antara warga negara dengan negaranya. Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Aturan tersebut mengharuskan adanya pembentukan koalisi dari partai-partai politik. Pemilihan kepala daerah saat ini diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bekerja secara mandiri dan baik (Putra et al., 2022).

Salah satu kabupaten yang ikut melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 yaitu Kabupaten Kuantan Singingi. Pasangan calon nomor urut satu yaitu Andi Putra dan Suhardiman Amby mampu memperoleh suara tertinggi. Pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby memperoleh 70.238 suara atau 44,02 persen dari jumlah suara yang ada, pasangan Mursini-Indra Putra memperoleh 36.985 suara atau 23,2 persen, dan pasangan Halim-Komperensi memperoleh 52.383 suara atau 32,8 persen (Riau Pos, 2021). Bupati petahana yaitu Mursini mengalami kekalahan. Menariknya koalisi partai politik pendukung pasangan calon nomor urut satu ini memiliki jumlah kursi di DPRD yang paling sedikit di banding dua pasangan calon lainnya. Berikut ini data koalisi partai pada Pemilihan Kepala Daerah

Kuantan Singingi tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Koalisi partai politik pada Pilkada Kuantan Singingi tahun 2020

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Kursi Di DPRD	Total Kursi (%)
Andi Putra – Suhardiman Amby	Golkar	6 kursi	9 kursi 26%
	Hanura	1 kursi	
	PKS	2 kursi	
Mursini – Indra Putra	PPP	4 kursi	11 kursi 31 %
	Nasdem	4 kursi	
	PKB	3 kursi	
Halim – Komperensi	PDI-P	3 kursi	15 kursi 43%
	PAN	4 kursi	
	Gerindra	4 kursi	
	Demokrat	4 kursi	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat koalisi yang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kuantan Singingi tahun 2020 dengan jumlah kursi anggota DPRD dari partai-partai pendukung koalisi. Jika dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kuantan Singingi tahun 2015, maka pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 ini diisi oleh kandidat calon yang sama, hanya berganti pasangan antara nomor urut 2 dan 3, namun nomor urut satu merupakan pasangan calon baru. Terdapat perubahan signifikan koalisi partai-partai pendukung pasangan calon dengan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2015. Pemilihan Kepala Daerah Kuantan Singingi tahun 2015 juga diikuti oleh tiga pasangan calon. Ketiga pasangan calon tersebut yaitu pasangan Mardjan Ustha-Muslim, Indra Putra-Komperensi, dan pasangan Mursini-Halim.

Kemudian pola koalisi yang dilakukan oleh partai-partai pada Pemilihan Kepala Daerah Kuantan Singingi tahun 2020 tampaknya sangat berbeda dengan pola koalisi yang dilakukan oleh partai pada pemilihan umum tahun 2019. Pada pemilu tahun 2019 antara partai PDI-P dan Gerindra berlawanan, namun pada Pemilihan Kepala Daerah Kuantan Singingi tahun 2020 kedua partai tersebut berkoalisi, begitu juga partai-partai lainnya. Koalisi di tingkat lokal yang tidak sejalan dengan koalisi di tingkat pusat (Danar & Ardianto, 2019). Selain pola koalisi yang terjadi di daerah yang tidak mengikut pola koalisi nasional, pembentukan koalisi partai-partai tidak dilandasi oleh ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai, namun ada hal lain yang melandasi terbentuknya koalisi partai-partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kuantan Singingi tahun 2020 ini.

Unsur lain seperti kepentingan bisa saja menjadi salah satu tendensi yang melandasi terbentuknya koalisi partai-partai politik pada Pemilihan Kepala. *'interest will not lie'* dapat menjadi landasan sosiologis yang otentik bahwa kepentingan pada dasarnya mampu menjelaskan modus realitas sosial dalam masyarakat digital. Kepentingan merupakan partikel inti dalam tindakan sosial (Susan & Singgih, 2023). Jika di dibandingkan dengan pola koalisi partai-partai politik di Malaysia etnis dan agama memegang peranan penting dalam menentukan hasil pemilihan umum di Malaysia (黃田恬FoongHolly, 2017). Selain itu pada dasarnya koalisi dibentuk hanya untuk menjaga kestabilan politik negara untuk kenyamanan politik dan tidak berlaku dalam jangka waktu yang panjang (Choy, 2007).

Koalisi partai-partai pada saat ini di tataran pusat mengalami perbedaan yang signifikan dikarenakan pergeseran ideology yang dialami partai-partai (Mayrudin, 2017) dan partai-partai juga tidak konsisten dalam melakukan pembentukan koalisi (Priangani, 2019). Pada tataran politik lokal, koalisi yang terjadi di daerah mengedepankan aspek keuntungan materi yang didapatkan partai saat berkoalisi (Yahya, 2016). Koalisi pada tingkat lokal lebih memperhatikan Elektabilitas dan popularitas (Leda, 2023) sehingga yang kurang populer menyebabkan rendahnya perolehan suara (Riadi, 2022). Para kandidat calon rebut restu pusat (ARISKA, 2018).

Sistem politik lokal membahas kehidupan berdemokrasi digelar dalam skala lokal, tentang pengaturan kekuasaan dalam skala lokal dan tentang wujud nyata demokrasi lokal dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara di tingkat lokal (Ibrahim, 2013). Politik lokal diartikan sebagai interaksi antar-aktor dalam satu wilayah sehingga mencetuskan dinamika politik didalamnya (Agustino, 2014). Sehingga banyak ditemui dinamika dalam pelaksanaan demokrasi ditingkat daerah.

Dinamika politik lokal adalah gambaran kinerja dari sistem politik lokal tertentu. Pengertian lokal disini dapat saja daerah provinsi ataupun daerah Kabupaten/kota (Ibrahim, 2013). Partai politik merupakan sebuah organisasi, instrument perjuangan nilai atau ideology, melalui penguasaan struktur kekuasaan dan instrument untuk meraih kekuasaan adalah melalui pemilihan umum (Pamungkas & Parlindungan, 2011). Fungsi partai politik dari konseptualisasi (Key, 1964) tentang kerangka tiga bagian partai yaitu partai di pemilih/elektorat (*party in electorate*), partai sebuah organisasi (*party organization*), dan partai di institusi pemerintahan (*party in the government*).

Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah (Heywood, 2000). Pengertian lain koalisi adalah penggunaan sumberdaya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit (Gamson, 1961). Koalisi merupakan upaya yang bisa mengikat partai untuk membentuk pemerintahan (Aisah Putri Budiarti, 2021). Terbentuknya koalisi secara teori berasal dari beberapa asumsi oleh para pakar politik. Salah satu pakar yang berpendapat mengenai teori koalisi yaitu Arend Lijphart yang membagi teori koalisi kedalam 6 jenis berdasarkan ukuran (Lijphart, 1999) yaitu pertama *Minimal Winning Coalition*, koalisi jenis ini terjadi dengan mengabaikan faktor ideologi dan juga posisi dari partai politik tersebut. Kedua *Minimum Size Coalitions*, teori koalisi ini didasarkan pada maksimalisasi kekuasaan dengan mengabaikan partai yang tidak perlu. Ketiga *Bargaining Proposition*, Proses negosiasi atau tawar menawar politik dalam koalisi akan lebih mudah dengan partai yang lebih sedikit. Keempat *Minimal Range Coalition*, asumsinya lebih mudah membentuk dan mempertahankan koalisi antar partai dengan kebijakan preferensi serupa daripada dengan partai yang berjauhan dalam hal ini. Kelima *Minimal Connected Winning Coalitions*, dasar koalisi ini ialah karena masing-masing dari partai politik memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksananya, walaupun kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Keenam *Policy-Viable Coalitions*, koalisi ini fokus pada preferensi kebijakan.

Terbentuknya suatu koalisi partai-partai politik dilandasi beberapa motif untuk melakukan koalisi oleh masing-masing partai, menurut (Noor, 2020) terdapat beberapa motif berkoalisi yaitu motif ideologis, motif kesamaan agenda, motif kesamaan pandangan atas figur pemimpin yang ideal, dan Motif oportunitis – praktis. Partai secara tipikal memiliki satu dari dua motif dalam berkoalisi (Debus, 2008). Koalisi dapat dilihat dari pendekatan ukuran (*office-seeking or policy-blind theories*) (De Winter & Dumont, 2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Anggito & Setiawan, 2018). Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti

foto, dokumen, catatan, lapangan pada saat penelitian dilakukan (Rukin, 2019). Proses pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara alami, praktik penelitian terjun langsung ke lapangan dengan mengamati, mencatat, mengkategorikan penelitian yang dilakukan (Sadiah, 2015). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiarto, 2017). Dalam menentukan informan penelitian yang menjadi subjek pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive sampling* (Wijaya, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen terkait (Mamik, 2014). Menurut Huberman dan Miles (1994) di dalam (Hartono, 2018) bentuk analisis data dilakukan melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pembentukan Koalisi Pasangan Calon Andi Putra dan Suhardiman Amby

Pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby atau biasa disebut ASA mendaftar ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada 4 September 2020 dan menjadi pasangan pertama yang mendaftar. Andi Putra mencalonkan diri menjadi calon bupati Kuantan Singingi setelah sebelumnya ia menjabat sebagai anggota dan ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Pengalaman politik yang cukup besar ini menghantarkannya untuk mengikuti Pilkada Kuantan Singingi tahun 2020. Suhardiman Amby merupakan orang lama dalam dunia politik di Kuantan Singingi. Ia pernah mencalonkan diri pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kuantan Singingi tahun 2006. Lalu ia juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dua periode 2004-2014, namun gagal kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024. Suhardiman Amby juga merupakan anggota dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU).

Pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby didukung oleh koalisi dengan anggota koalisinya yang berjumlah tiga partai politik dan dengan jumlah kursi DPRD paling sedikit dibandingkan pasangan calon lainnya yaitu Sembilan kursi. Koalisi yang terbentuk memiliki konfigurasi ideologi partai politik yang bervariasi atau tidak seideologi. Partai Golkar dengan aliran nasionalis sekuler, partai Hanura beraliran nasionalis religius, dan partai PKS yang beraliran islam. Perolehan suara dan jumlah kursi dari partai penguang bisa dijadikan patokan untuk memperkirakan perolehan suara pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan pasti karena terjadinya dinamika yang ada di masyarakat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golkar memberikan dukungan pada pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby pada 21 Maret 2020. Pemaparan tersebut menggambarkan komitmen yang besar dari partai Golkar untuk mengusung Andi Putra menjadi calon bupati Kuantan Singingi. Sepak terjang Golkar yang cukup besar di Kuantan Singingi akan dipertaruhkan oleh Andi Putra. Namun hal ini juga tidak terlepas dari nama besar yang ada di belakang Andi Putra yaitu ayahnya Sukarmis yang merupakan mantan bupati Kuantan Singingi dua periode. Andi Putra pada awal-awal pendaftaran berpasangan dengan Rofingi. Mereka sebelumnya telah mendaftar ke beberapa partai, namun Rofingi mengundurkan diri pada 26 November 2019. Pengunduran diri Rofingi ini membuat Andi Putra harus menentukan calon baru yang akan mendampingi. Andi Putra kembali melakukan komunikasi politik dan lobi politik. Hingga akhirnya pada 29 November 2019 pilihan Andi Putra jatuh kepada Suhardiman Amby yang juga telah mendaftarkan diri pada partai-partai untuk maju pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kuantan Singingi 2020.

Keputusan Hanura yang akhirnya mencalonkan kader dan ketua DPC nya untuk menjadi calon wakil bupati pun ternilai cukup cepat. Setelah Rofingi membuat pernyataan mengundurkan diri, tiga hari kemudian Andi Putra tersiar kabar Suhardiman Amby-lah yang akhirnya menggantikan posisi Rofingi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Hanura memberikan dukungan pada pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby pada 10 Juli 2020 Keputusan memilih Suhardiman Amby ini tidak terlepas dari sepak terjang Suhardiman Amby yang cukup mumpuni dalam dunia politik. Golkar dan Hanura menjadi partai pengung calon bupati dan wakil bupati.

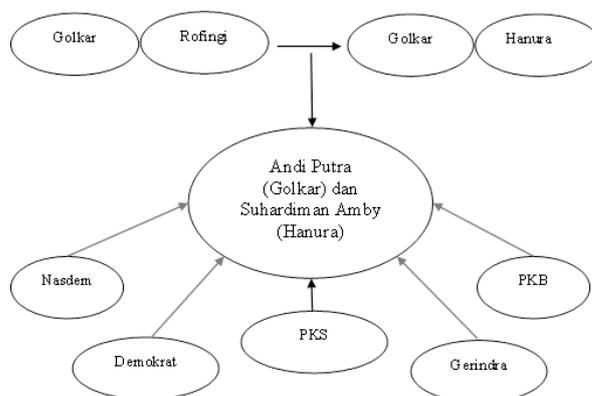
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai PKS memberikan dukungan pada pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby pada 26 Juni 2020. Bergabungnya PKS pada koalisi yang mendukung pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby yang diusung oleh partai Golkar dan Hanura menjadi koalisi ini sangat bervariasi. Pola koalisi yang terbentuk terlihat sederhana dan koalisi yang terjadi tidak masuk dalam kategori koalisi gemuk.

Partai Nasdem dan partai Demokrat yang awalnya memberikan kecenderungan lebih untuk mendukung pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby pada akhirnya berbelok arah mendukung calon pasangan lain. Padahal partai Nasdem turut mendampingi Andi Putra ketika mendaftar di partai Golkar untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Partai Demokrat juga begitu halnya, Demokrat telah melakukan rapat hingga hasil dari rapat terakhir menyatakan Demokrat akan mendukung Andi Putra dan Suhardiman Amby. Tetapi

hal itu bertolak belakang dengan keputusan akhir yang diberikan oleh DPP partai Demokrat. Koalisi yang mendukung pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby ini hanya didukung oleh tiga partai dengan Sembilan kursi di DPRD. Gagal terbentuknya kesepakatan antar partai semakin memperkuat pernyataan bahwasannya partai hanya digunakan alat untuk perebutan kekuasaan (Kurniawan & Handayani, 2022).

Koalisi besar yang diharapkan agar mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kuantan Singingi 2020 ternyata tidak terwujud. Koalisi yang mendukung pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby ini hanya didukung oleh tiga partai dengan Sembilan kursi di DPRD. Dinamika yang terjadi pada pembentukan koalisi yang mendukung pasangan ASA terkesan pragmatis dan paternalistik yang digunakan untuk mencari kekuasaan (*office seeking*). Jika ditilik koalisi yang terbentuk pada pasangan yang mendukung pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby ini dengan jenis-jenis koalisi yang dikemukakan Arend Lijphart maka koalisi ini masuk kedalam kategori Minimum Size Coalition (MSC). Pemanfaatan elit politik (*local strongman* Sukarmis) yang berkekuatan besar untuk menarik perhatian partai-partai lain dan masyarakat digunakan untuk memperoleh suara mayoritas sehingga mendapatkan kekuasaan.

Dinamika yang terjadi dapat dilihat lebih lanjut pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Dinamika terbentuknya koalisi ASA

Pada bagan diatas dapat dilihat bahwa dinamika yang terjadi pada pembentukan koalisi yang mendukung pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby sangat dinamis dan dilirik oleh partai politik lain yang tidak mengusung calon untuk maju pada perhelatan pemilihan kepala daerah kabupaten Kuantan singingi. Dinamika yang dinamis dalam proses kandidasi politik ini menunjukkan proses tawar-menawar antar partai yang akan menentukan laku atau tidaknya kandidat tersebut bagi partai lain (Norris, 2013). Gagalnya partai-partai lain bergabung (Demokrat,

Gerindra) dengan koalisi ASA dikarenakan putusan yang di berikan DPP yang memerintahkan bergabung ke koalisi lain menunjukkan dinamika yang terjadi bahwa DPP yang pada akhirnya menentukan keputusan bergabung ke koalisi apa (Nurhasim, 2020).

Dinamika Pembentukan Koalisi Pasangan Calon Mursini dan Indra Putra

Bupati petahana yang kembali mencalonkan diri menjadi calon bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang berpasangan dengan Indra Putra kader Golkar yang akhirnya diusung Nasdem mantan lawannya pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kuantan Singingi tahun 2015. Pasangan Mursini dan Indra Putra didukung oleh koalisi dengan anggota koalisinya yang berjumlah tiga partai politik dan dengan jumlah kursi DPRD sebelas kursi yang lebih banyak jumlahnya dari pasangan nomor urut satu. Koalisi yang terbentuk untuk mendukung dan mengusung pasangan ini juga memiliki konfigurasi ideologi partai politik yang bervariasi atau tidak se-ideologi. Koalisi yang mendukung pasangan Mursini dan Indra Putra terdiri dari tiga partai yaitu partai PPP dengan aliran islam, partai Nasdem dengan aliran nasionalis sekuler, dan partai PKB dengan aliran islam. Dua partai beraliran islam tergabung dalam koalisi ini dan ditambah dengan partai dengan aliran nasionalis sekuler.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai PPP memberikan dukungan pada pasangan calon Mursini dan Indra Putra pada 9 Juni 2020. Pernyataan pada wawancara tersebut memperlihatkan dinamika yang terjadi pada pencalonan bupati incumbent dengan mantan lawannya yaitu Indra Putra pada kontestasi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Ketika dua calon lainnya jauh-jauh hari telah mendeklarasikan pasangannya, Mursini menjadi calon terakhir yang mengumumkan siapa calon wakil bupati yang akan mendampingi. Terlambatnya Mursini mengumumkan calon ini dikarenakan proses pertimbangan yang cukup lama dan juga kandidat-kandidat yang masuk dalam bursa calon pendampingnya sudah digaget partai lain. Sebelumnya Mursini di gadang-gadangkan akan berpasangan dengan dr. Fahdiansyah atau dr. Ukup namun ternyata tidak jadi.

Mursini menjatuhkan pilihan pada Indra Putra untuk mendampinginya dengan kendaraan yang dibawa oleh Indra Putra adalah partai Nasdem. Partai Nasdem yang sebelumnya berjar akan mendukung pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby ternyata berbelok arah menjadi partai penguasa Indra Putra yang notabeneanya juga keluarga Andi Putra menjadi calon wakil bupati Mursini. Keputusan ini menarik perhatian kha-

layak ramai karena akan terpecahnya suara bagian tengah. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Nasdem memberikan dukungan pada pasangan calon Mursini dan Indra Putra pada 16 Juli 2020.

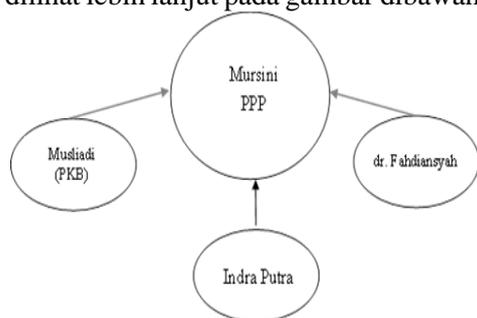
Lambatnya penentuan pasangan Mursini karena terpecahnya konsentrasi seiring mencuatnya kabar dugaan korupsi yang menimpa Bupati Petahana tersebut. Dinamika yang terjadi terlihat tidak begitu antusiasnya partai lain untuk bergabung dengan PPP yang merupakan petahana. Namun di detik-detik terakhir sebelum proses pendaftaran ke KPU, PKB memutuskan bergabung dengan koalisi BERMITRA sehingga koalisi ini terdiri dari tiga partai politik (PPP, Nasdem, dan PKB). Memandang Mursini yang merupakan Bupati petahana yang tentunya memiliki elaktibilitas tinggi namun hasil akhir ternyata petahana tidak menjamin untuk mendapatkan kemenangan (Suryani & Rahayu, 2021).

PKB juga mengalami dilema pada proses komunikasi dan lobi politik Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kuantan Singingi 2020. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai PKB memberikan dukungan pada pasangan calon Mursini dan Indra Putra pada 4 September 2020. Hasil wawancara dengan salah satu kader PKB tersebut memperlihatkan bahwa PKB sangat sulit menentukan pilihan pada siapa dukungannya akan berlabuh. Bahkan sebelum memberikan dukungan resmi kepada Mursini dan Indra Putra PKB juga sempat merencanakan membentuk poros baru dalam pencalonan bupati dan wakil bupati bersama partai Gerindra dan partai Demokrat yang juga tergolong lambat dalam memberikan dukungan.

Terbentuknya koalisi yang mendukung pasangan Mursini dan Indra Putra yang merupakan mantan rival pada pilkada sebelumnya membuat semakin jelas pragmatismenya koalisi ini. Tujuan untuk mendapatkan kekuasaan (*office seeking*) dikedepankan dalam terbentuknya koalisi ini walaupun sebelumnya mereka merupakan lawan. Jika dikaitkan dengan macam-macam koalisi yang di klasifikasikan oleh Arend Lijphart maka koalisi yang mendukung pasangan Mursini Indra Putra dikategorikan pada *Minimum Size Coalitions*. Alasan koalisi yang mendukung pasangan Mursini dan Indra Putra ini dikatakan *Minimum Size Coalitions* karena koalisi ini tidak masuk dalam kategori partai yang gemuk dan terdiri dari tiga partai saja dengan jumlah kursi sebanyak sebelas kursi. Lalu jika dikaitkan dengan ideologi partai, ketiga partai tidak memiliki ideologi yang sama. Terbentuknya koalisi tersebut juga karena ketiga partai memiliki kesamaan tujuan dan juga kesamaan preferensi kebijakan dalam membangun koalisi.

Dinamika dalam proses pencalonan Mursini dan Indra Putra menjadi calon bupati dan

calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat lebih lanjut pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Dinamika terbentuknya koalisi BERMITRA

Dinamika Pembentukan Koalisi Pasangan Calon Halim Dan Komperensi

Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu wakil bupati petahana bersama pasangan calon wakil bupatinya Komperensi. Halim dan Komperensi menjadi pasangan calon terakhir yang mendaftar ke KPU yaitu pada 5 September 2020. Pasangan Halim dan Komperensi mendapatkan nomor urut tiga. Pasangan Halim dan Komperensi didukung oleh koalisi dengan anggota koalisinya yang berjumlah empat partai politik dan dengan jumlah kursi DPRD lima belas kursi yang mana koalisi yang mendukung pasangan calon ini merupakan koalisi paling besar. Koalisi yang terbentuk untuk mendukung dan mengusung pasangan ini memiliki konfigurasi ideologi partai politik yang bervariasi atau tidak se-ideologi. Koalisi yang mendukung pasangan Halim dan Komperensi terdiri dari partai PDI-P yang beraliran nasionalis sekuler, partai PAN yang beraliran pluralis berbasis masa islam, partai Demokrat yang beraliran nasionalis religius, dan partai Gerindra yang beraliran nasionalis sekuler.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai PDI-P memberikan dukungan pada pasangan calon Halim dan Komperensi pada 17 Juli 2020. Penuturan wawancara perwakilan PDI-P tersebut memberikan gambaran bahwa dalam pencalonan Halim dari PDI-P sudah konsisten dari awal dan juga PDI-P juga telah membidik calon pasangan Halim jauh sebelum Pemilihan kepala daerah (Pilkada) hangat dibicarakan. Halim membina komunikasi yang baik dengan Komperensi sehingga ketua DPC PAN Kuantan Singingi tersebut setuju berpasangan dengan Halim dan PAN berkoalisi dengan PDI-P. Halim dengan modal politik yang besar dan juga citra baik yang telah ia buat selama menjabat wakil bupati Kuantan Singingi membuat pada kader PDI-P setuju Halim kembali mencalonkan diri. Modal yang dimiliki Halim tentunya akan bertambah besar ketika ia berharap bisa berpasangan dengan wanita yang memiliki pengalaman besar di dunia politik yaitu Komperensi.

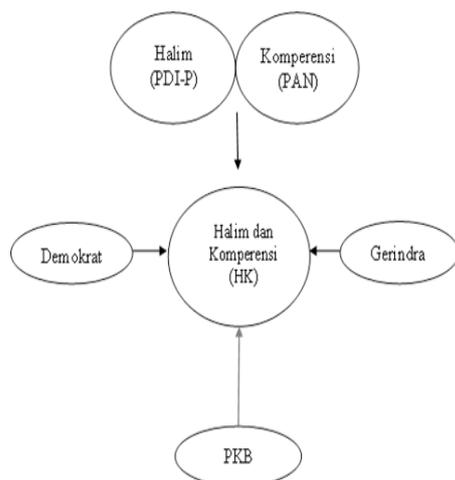
PAN sebagai partai yang menaungi Komperensi dan Komperensi sebagai ketua DPC PAN Kuantan Singingi menyetujui dirinya maju mencalonkan diri sebagai wakil bupati Kuantan Singingi yang berpasangan dengan Halim. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai PAN memberikan dukungan pada pasangan calon Halim dan Komperensi pada 8 Mei 2020. Hasil wawancara yang dilakukan memberikan penjelasan bahwa PAN begitu mantap menyetujui untuk berkoalisi dengan PDI-P dan mencalonkan kadernya sebagai wakil bupati.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat memberikan dukungan pada pasangan calon Halim dan Komperensi pada 1 September 2020. Dinamika politik yang terjadi di Demokrat begitu dinamis. Sebelum memberikan dukungan pada Halim dan Komperensi Demokrat menunjukkan kecenderungannya untuk mendukung pasangan Andi Putra dan Suhardiman Amby. Ketika DPC Kuantan Singingi dan DPW Riau memberikan dukungan kepada Andi Putra dan Suhardiman Amby, namun yang terjadi DPP memberikan dukungan pada Halim dan Komperensi. Putusan dukungan tersebut membuat Demokrat berubah haluan dan masuk kedalam koalisi bersama PDIP dan PAN. Demokrat pada awal hingga pertengahan tahun 2020 juga diusulkan ikut ke dalam poros baru yang akan mencalonkan kader yang berasal dari partai PKB, Demokrat dan Gerindra. Merapatnya Demokrat dan Gerindra merupakan sebuah kejutan karena sebelumnya kedua partai ini lebih dominan memberikan dukungan pada pasangan ASA, namun keputusan DPP yang pada akhirnya menentukan bergabungnya ke koalisi HK (Nurhasim, 2020).

Dinamika dalam pemberian dukungan juga terjadi pada partai Gerindra. Gerindra yang memiliki tiga kursi menjadi lirikan bagi para pasangan calon. Gerindra juga mengalami dinamika dalam proses diskusi penentuan dukungan atau mengusung kadernya. Proses komunikasi dan lobi politik terjadi cukup lama sehingga Gerindra cenderung lambat memberikan putusan dukungan pada calon yang ada. Hingga pada akhirnya Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi PDI-P, PAN, dan Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Gerindra memberikan dukungan pada pasangan calon Halim dan Komperensi pada 5 Agustus 2020. Wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa dinamika yang terjadi di partai Gerindra dalam memberikan dukungan juga cukup dinamis. Kecenderungan awal yang diberikan pada pasangan calon Andi Putra dan Suhardiman Amby berakhir beralih haluan. Lalu Gerindra juga memberikan peluang untuk mendukung Mursini pada saat Mursini belum mengumumkan pasangan calon wakil bupati yang akan mendampingi.

Terbentuknya koalisi yang mendukung pasangan Halim dan Komperensi ini sangat terkesan pragmatis dan partai-partai bergabung dikarenakan alasan ingin mendapatkan kekuasaan (*office seeking*) untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan secara pragmatis. Partai-partai yang pada awalnya merapat dan memberikan dukungan pada pasangan calon lain akhirnya berbelok dan bergabung dengan koalisi HK dikarenakan kesepakatan yang dibuat antara partai-partai tersebut. Bentuk koalisi yang mendukung pasangan Halim dan Komperensi jika dilihat dari jenis-jenis koalisi menurut Arend Lipjhart termasuk kedalam jenis *Minimal Winning Coalitions*. Koalisi ini dibentuk atas dasar untuk memaksimalkan kekuasaan. Koalisi dengan tipe *Minimal Winning Coalition* memaksimalkan kekuatan dengan memegang sebanyak mungkin kursi. Koalisi yang mendukung pasangan Halim dan Komperensi adalah koalisi besar dengan jumlah hampir setengah kursi DPRD. Koalisi ini dibentuk dengan tidak mengedepankan unsur kesamaan atau kedekatan ideologi, artinya unsur ideologi mereka abaikan. Hal ini dapat dilihat ada dua partai yang beraliran nasionalis-sekuler serta ada yang beraliran pluralis islam serta nasionalis religius. Motif oportunitis praktis sangat mempengaruhi terbentuknya koalisi ini karena partai-partai tersebut lebih mementingkan memaksimalkan kekuasaan sehingga akan mendapatkan keuntungan (Khodijah & Subekti, 2020).

Dinamika dalam proses pencalonan Halim dan Komperensi menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat lebih lanjut pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Dinamika Koalisi HK

KESIMPULAN

Dinamika yang terjadi dalam pembentukan koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 menunjukkan pola koalisi yang terjadi diantara ketiga pasangan calon. Pembentukan koalisi partai po-

litik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung secara dinamis dan bersifat cair. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 di ikuti oleh tiga koalisi. Terbentuknya koalisi-koalisi peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 didasarkan pada alasan pragmatisme dan cenderung paternalistik. Ketiga koalisi yang terbentuk tergolong kedalam jenis koalisi *Office Seeking* yang mengutamakan mencari kekuasaan. Koalisi yang mendukung ASA dan Kolisi yang mendukung Bermitra tergolong kedalam *Minimum Size Coalition*. Koalisi ini terbentuk dengan tujuan mencari kekuasaan dan mengabaikan spektrum ideologi. Koalisi yang mendukung pasangan HK tergolong kedalam *Minimum Winning Coalition* karena koalisi ini koalisi besar yang digunakan untuk memperoleh suara mayoritas sehingga mendapatkan kekuasaan. Dinamika bergabung dan tidaknya partai-partai kedalam koalisi sangat dilematis dan sangat prgamatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Aisah Putri Budiarti, D. K. K. (2021). *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- ARISKA, R. H. (2018). Analisis Dinamika Politik Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2017 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati). Faculty of Social and Political Science.
- Choy, A. M. C. T. E. K. (2007). Democratic Action Party of Malaysia and the Politics of Opposition Coalition Building.
- Danar, Y. E., & Ardianto, H. T. (2019). Dinamika Koalisi Partai Politik Di Tingkat Lokal: Studi Kasus Koalisi Pdi-pkb Dalam Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 411–420.
- De Winter, L., & Dumont, P. (2006). Parties into government: Still many puzzles. *Handbook of party politics*, 175–188.
- Debus, M. (2008). Party Competition and Government Formation in Multilevel Settings: Evidence from Germany1. *Government and Opposition*, 43(4), 505–538.
- Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Politik hukum pemilu*. Konstitusi Press (Konpress).

- Gamson, W. A. (1961). A Theory of Coalition Formation. *American sociological review*, 373–382.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi Offset.
- Heywood, A. (2000). *Key concepts in politics*. Palgrave Basingstoke.
- Ibrahim, A. (2013). *Dinamika Politik Lokal: Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Penerbit Mandar Maju.
- Key, V. O. (1964). Parties, politics and pressure groups. New York: Crowell.
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177–187.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1–8.
- Leda, H. A. (2023). Orientasi Pembentukan Koalisi dan Fragmentasi Kepentingan dalam Penentuan Calon Wakil Bupati Ende Sisa Masa Jabatan. *Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 2322–2330.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale university press.
- Mahpudin, M., Hamid, A., & Dewi, S. K. (2018). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017.
- Mamik, M. (2014). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher. Zifatama Publisher.
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 2(2).
- Noor, F. (2020). *Demokrasi dan Oligarki*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia.
- Nurhasim, M. (2020). *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.
- Pamungkas, S., & Parlindungan, U. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik Di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.
- Priangani, A. (2019). Partai Politik Dan Inkonsistensi Koalisi Dalam Pemilu 2014 Dan 2019. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 79–88.
- Putra, A. M., Zetra, A., & Valentina, T. R. (2022). Peran Dan Fungsi Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 346–353.
- Riadi, M. G. F. (2022). Koalisi Dan Modalitas (Analisis Kekalahan Pradi Supriatnaafifah Alia Dalam Pilkada Kota Depok 2020). Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- Riau Pos. (2021). *KPU Kuansing Tetapkan Bupati dan Wabup Terpilih*. Diambil dari <https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singingi/20/02/2021/246422/kpu-kuansing-tetapkan-bupati-dan-wabup-terpilih.html>
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Sadiah, D. (2015). Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media*. Diandra Kreatif.
- Susan, N., & Singgih, D. S. (2023). Interest as a mode of reality: Answering the crisis of digital society Kepentingan sebagai mode realitas: Menjawab krisis masyarakat digital. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(1), 88–100.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yahya, S. (2016). Institusi politik dan pilkada: studi atas koalisi partai pendukung Airin Rachmi Diany dan Bennyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangsel 2015. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- 黄田恬FoongHolly. (2017). 新两线旧局限: 马国民主行动党与马来政党关系变迁= Rising two-coalition system with past constraints: the history of relationships between Democratic Action Party (DAP) and Malay political parties in Malaysia.